

KAJIAN STRATEGIS KELITBANGAN BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026

Mada Sophianingrum*, Jawoto S Setyono, Bintang Septiarani, Melisa A Manurung

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Semarang, 50275, Indonesia

Jurnal Riptek

Volume 15 No. 2 (28–37)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

Info Artikel:

Diterima: 19 Oktober 2021

Direvisi: 6 November 2021

Disetujui: 29 November 2021

Tersedia online: 31 Desember 2021

Kata Kunci:

Evidance Based Policy

Kelitbangan

Korespondensi penulis:

*mada.sophianingrum@live.ac.id

Abstract. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyusun roadmap dan arahan kegiatan penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan bagi OPD di Pemerintahan Kota Semarang khususnya pada bidang sosial, budaya, dan pemerintahan tahun 2021-2026. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif, komparasi, analisis gap, dan analisis prioritas. Rancangan Akhir RPJM Kota Semarang tahun 2021-2026 menjadi acuan penyusunan usulan dan arahan prioritas pelaksanaan kegiatan kelitbangan. Adapun data utama yang dianalisis pada penelitian ini yaitu data kegiatan, penelitian, pengembangan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh 21 OPD di bidang sosial, budaya, dan pemerintahan pada tahun 2016-2021. Selain itu, usulan tema dari kajian strategis yang telah dilakukan pada tahun 2016 juga digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun usulan tema kelitbangan. Data penelitian yang berhasil dihimpun dari semua OPD kemudian dikelompokkan berdasarkan bidang urusan yang kemudian disandingkan dengan Cascading RPJMD Kota Semarang 2021-2026. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat 45 usulan tema kegiatan kelitbangan. Setiap usulan telah diberi arahan prioritas pelaksanaan, penanggungjawab utama dan pendukung, serta arahan bentuk pelaksanaan yang terdiri dari swakelola dan hibah. Arahan usulan tema kelitbangan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 21 OPD bidang sosial, budaya, dalam melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan yang dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kota Semarang pada tahun 2021-2026.

Cara mengutip:

Sophianingrum, M; Setyono, JS; Septiarani, B; Manurung, MA. 2021. Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan Kota Semarang Tahun 2021-2026. *Jurnal Riptek*. Vol. 15 (2): 28-37.

PENDAHULUAN

Proses perumusan kebijakan di Indonesia masih terus mengalami transformasi. Pada awalnya perumusan kebijakan masih banyak dibuat berdasarkan ideologi, intuisi, pengalaman, opini publik, ataupun berdasarkan kepentingan politik. Namun, saat ini penelitian sudah banyak diterapkan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan di Indonesia (Basitha, 2018). Tinjauan lebih lanjut terhadap literatur lama, menyebutkan bahwa transformasi dalam perumusan kebijakan sudah terjadi sejak tahun 1996 di Kanada. Saat itu pemerintah Kanada membentuk satu badan untuk membuat sebuah penelitian yang dapat menemukan dan merumuskan strategi untuk menjawab kebutuhan dan tantangan di masa depan (Nutley, Davies, and Walter, 2002).

Dalam literatur lain, Bulmer (1982) dan Finch (1986) menyebutkan bahwa pemerintah Kerajaan Inggris mulai menerapkan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan sejak awal abad ke-19. Transformasi tersebut menjadi titik balik dalam perwujudan hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan di negara tersebut. Sementara itu, hingga

saat ini penerapan kebijakan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti sulitnya mengatasi permasalahan yang kompleks antar pemilik kepentingan di lingkup pemerintahan (Smeru, 2019). Pada kenyataannya, kolaborasi dari berbagai tingkatan sangat dibutuhkan, hal ini juga sudah tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yang menyebutkan bahwa keterlibatan peneliti sangat dianjurkan dalam perumusan kebijakan. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah tidak dapat melakukan penelitian maupun menjalin kerjasama dengan peneliti yaitu karena keterbatasan sumber dana dan tenaga kerja.

Penjabaran di atas telah memberikan gambaran bahwa penelitian sudah diterapkan sejak lama di luar maupun dalam negeri. Adapun tujuannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dengan berbasis bukti sehingga kebijakan yang dirumuskan efektif dan dapat diterapkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Lyons, 1999 dalam Dukeshire dan Thurlow, 2002). Pada artikel ini, penyusunan kajian strategis kelitbangan berfokus pada kegiatan kelitbangan yang dilakukan pemerintah Kota

Semarang. Litbang Bappeda Kota Semarang, berperan sebagai badan *think tank* pemerintah yang memiliki fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kota Semarang khususnya pada bidang sosial, budaya, dan pemerintahan. Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026, masih terdapat permasalahan dan isu strategis pembangunan di bidang sosial, budaya, dan pemerintahan yang memerlukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Contohnya pada bidang urusan pendidikan terdapat isu strategis yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Isu tersebut muncul karena masih terdapat beberapa permasalahan di bidang pendidikan yang belum teratasi dengan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan rancangan kegiatan penelitian dan pengembangan yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui perumusan kebijakan yang tepat.

Lebih dalam lagi, penelitian ini mencoba menjawab permasalahan melalui perumusan tema kelitbang yang dapat menyelesaikan permasalahan karena perubahan kondisi Kota Semarang yang sangat dinamis. Pertumbuhan kota yang sangat cepat salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas yang terjadi setiap hari. Kota Semarang menjadi ibukota provinsi yang memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis, sehingga memiliki daya tarik yang tinggi bagi penduduk di luar Kota Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya permintaan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, keamanan, ketertiban, dan lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi pembangunan di Kota Semarang yaitu terjadinya Pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan perubahan aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, dan lainnya. Perubahan tersebut memunculkan permasalahan-permasalahan baru, sehingga memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah dalam perumusan kebijakan yang efektif dan inklusif.

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan arahan kepada Litbang Bappeda dalam merumuskan kegiatan kelitbang untuk setiap OPD yang ada di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Adapun output dalam

penelitian ini berupa usulan tema kelitbang dan roadmap kelitbang yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan (2021-2026).

METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan ini adalah analisis konten, analisis kebijakan, dan analisis deskriptif kualitatif dengan penjelasan sebagai berikut:

Analisis Konten. Dilakukan dengan cara menganalisis isi dari informasi yang didapatkan dari literatur dan kebijakan. Adapun sumber bacaan yang digunakan pada tahap analisis ini yaitu dokumen perencanaan yang bersifat diperdakan (*statutory*) dan tidak diperdakan (*non-statutory*) seperti Rancangan Awal RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2025, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2016, serta literatur dan landasan normative lain yang terkait.

Analisis pemetaan. Digunakan untuk memetakan berbagai hal yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai dengan prioritas program bidang sosial, budaya dan pemerintahan berdasarkan RA-RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026.

Analisis Komparasi Deskriptif. Digunakan untuk menyandingkan informasi yang ada di dalam RA-RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026, LKPJ ATA Walikota Semarang tahun 2020, daftar penelitian yang sudah dilakukan, dan *best practice*. Pada tahap tersebut, peneliti mengkomparasikan data dan informasi yang termuat di dalam ketiga dokumen perencanaan di atas untuk mencari kekosongan/ *gap* penelitian dengan bidang urusan yang ada di pemerintahan Kota Semarang. Sementara itu, komparasi deskriptif untuk *best practice* dimaksudkan untuk mendapatkan referensi usulan judul penelitian yang diterapkan di daerah/ kota lain.

Analisis Prioritas. Pada penelitian ini analisis prioritas digunakan untuk menentukan prioritas penelitian dan pengembangan pada bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh OPD terkait di 5 tahun mendatang, yaitu tahun 2021-2025.



(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Gambar 1. Alur Penyusunan Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Kota Semarang

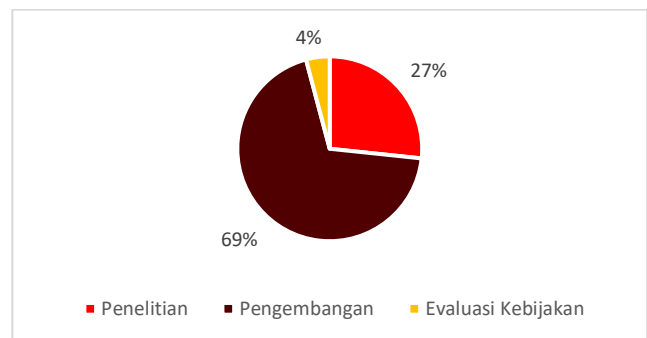
HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelitbangan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Bagian ini membahas dan menjabarkan secara detail kegiatan penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan oleh OPD di lingkup pemerintahan Kota Semarang khususnya bidang sosial, budaya, dan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penelitian yang telah dicapai dan yang masih terkendala dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaannya, peneliti memetakan penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang kemudian disandingkan dengan cascading RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026. Data kelitbangan yang diperoleh merupakan data-data yang terbagi menjadi 3 jenis kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian (R)
2. Pengembangan (D)
3. Evaluasi Kebijakan (E)

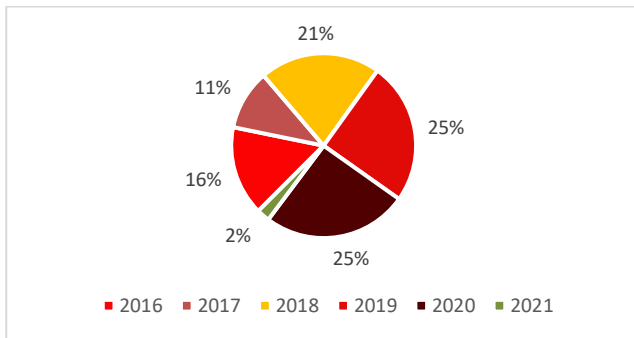
Data-data penelitian dan pengembangan yang sudah dilaksanakan oleh OPD di bidang sosial, budaya dan pemerintahan pada tahun 2016-2021 tersebut telah direkap dan dapat dilihat pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4. Berdasarkan hasil pendataan dari kegiatan survey sekunder yang telah dilakukan, diketahui bahwa 25 bidang urusan di bidang sosial, budaya, dan pemerintahan, telah melakukan 751 kegiatan kelitbangan yang terdiri atas

200 kegiatan penelitian, 519 kegiatan pengembangan, dan 32 evaluasi kebijakan selama pemerintahan tahun 2016-2021. Dengan demikian kegiatan pengembangan memiliki persentase perbandingan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan penelitian dan evaluasi kebijakan yaitu sebesar 69%. Sementara itu, persentase jumlah kegiatan penelitian yaitu sebesar 27% dan kegiatan evaluasi kebijakan sebesar 4% (Gambar 2). Selanjutnya, apabila ditinjau lebih dalam lagi melalui grafik jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan pertahun sebagaimana yang tampak pada Gambar 4, diketahui bahwa jumlah kegiatan meningkat signifikan dari tahun 2016-2020.



(Sumber: Analisis Peneliti, 2021)

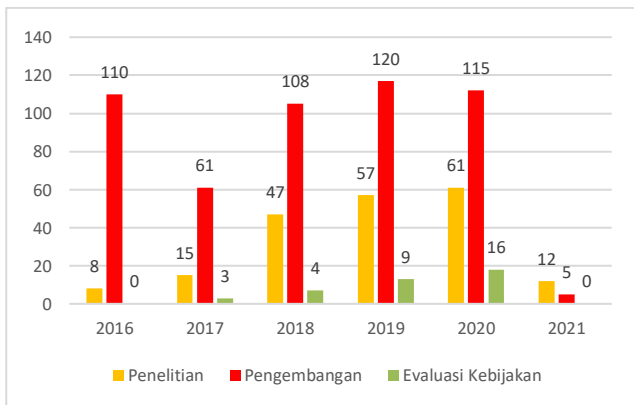
Gambar 2. Perbandingan Persentase Jumlah Seluruh Kegiatan Kelitbangan Berdasarkan Bentuk Kegiatan



(Sumber : Analisis Peneliti, 2021)

Gambar 3. Perbandingan Bentuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan 2016-2021

Berdasarkan Gambar 4, jumlah kegiatan penelitian pada tahun 2021 tidak sebanyak tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena, kegiatan penyusunan kajian strategis dilakukan di pertengahan tahun 2021 sehingga data kelitbangan belum terdokumentasi seluruhnya. Sementara itu, kegiatan pengembangan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, jumlah kegiatan pengembangan yang dilakukan OPD hanya berjumlah 61 kegiatan dan pada tahun 2020 jumlah kegiatan meningkat menjadi 108 kegiatan. Hasil pendataan kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan terakumulasi seluruhnya dalam Tabel 1.



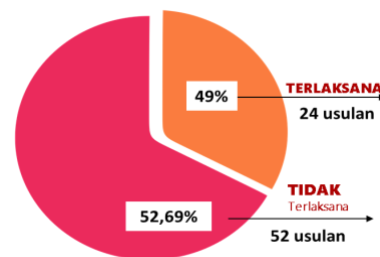
(Sumber : Analisis Peneliti, 2021)

Gambar 4. Perbandingan Bentuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan 2016-2021

Berdasarkan data distribusi pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh OPD Kota Semarang sebagaimana yang tampak pada Tabel 1, menunjukkan bahwa setiap tahunnya masing-masing OPD telah melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan. Tabel tersebut juga memberikan gambaran yang lebih detail terkait jumlah dari masing-masing jenis kegiatan yang dilakukan OPD pertahun. Terlihat bahwa jumlah kegiatan pengembangan jauh lebih banyak dibandingkan penelitian dan evaluasi

kebijakan (Gambar 2). Meskipun demikian hasil pendataan ini nantinya masih harus melalui analisis gap, dimana *long list* di kelompokkan berdasarkan bidang urusan dan ditinjau apakah kegiatan kelitbangan tersebut mendukung arahan kebijakan atau masih kurang mendukung arahan kebijakan pembangunan.

Gambaran kondisi kelitbangan juga ditinjau berdasarkan pelaksanaan usulan kelitbangan dari kajian sebelumnya yang telah dilakukan pada tahun 2016-2021. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana OPD telah melaksanakan usulan-usulan kelitbangan yang telah dirumuskan. Pencapaian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat pada Gambar 5. Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa 19 bidang urusan mendapat usulan/kegiatan. Beberapa diantaranya mendapat lebih dari 3 judul usulan kegiatan penelitian dan pengembangan. Sementara itu, total bidang urusan yang belum mendapat usulan kegiatan penelitian dan pengembangan dari kajian kelitbangan tahun 2016-2021 yaitu sebanyak 8 bidang urusan antara lain Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan, Inspektorat Daerah; Penghubung, Keuangan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; dan Persandian. Adapun total usulan penelitian dan pengembangan dari kegiatan sebelumnya yaitu 76 usulan. Perbandingan persentase dari pelaksanaan penelitian oleh OPD dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa dari total 76 usulan kegiatan penelitian dan pengembangan hanya 24 usulan yang dilaksanakan oleh OPD. Sementara sisanya yaitu 52 usulan penelitian tidak dilakukan oleh OPD pada tahun 2016-2021. Sehingga persentase usulan penelitian yang tidak dilaksanakan yaitu 31% dan usulan kegiatan penelitian dan pengembangan yang terlaksana lebih besar yaitu 69%. Hasil analisis yang lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.

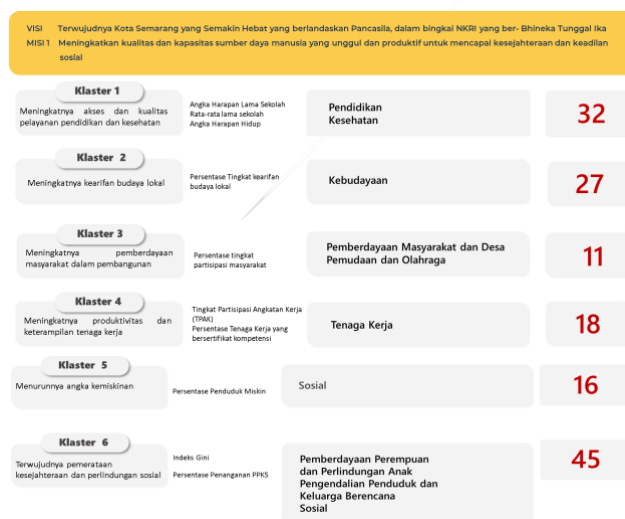


(Sumber : Analisis Peneliti, 2021)

Gambar 5. Perbandingan Jumlah Usulan Penelitian yang Terlaksana dan Tidak Terlaksana dari Kajian Kelitbangan 2016-2021

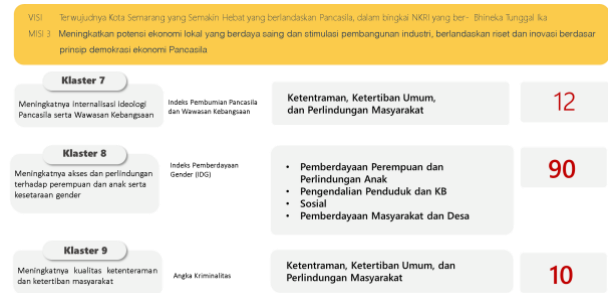
Analisis Gap antara Penelitian 2016-2021 dengan Tujuan Pembangunan 2021-2026. Analisis kesenjangan (gap) merupakan analisis yang dilaksanakan dengan cara menyandingkan antara klaster bidang urusan yang disusun berdasarkan sasaran pembangunan dengan daftar penelitian yang sudah dilakukan OPD. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui sasaran rencana pembangunan tahun 2021-2026 yang belum terdapat data penelitian dan pengembangan yang mendukung. Pada tahapan ini sasaran akan disebut sebagai klaster. Setiap klaster sasaran berisikan bidang-bidang urusan yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan analisis gap ini diawali dengan penyusunan sasaran dan indikator sasaran yang didapatkan dari RA-RPJMD 2021-2026. Indikator sasaran ini membantu dalam penentuan data-data penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Sasaran pembangunan tahun 2021-2026 tersebut disandingkan dengan data yang didapatkan terkait dengan penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya, dan pemerintahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2021. Data penelitian dan pengembangan yang sudah dikelompokkan berdasarkan bidang urusan, kemudian disandingkan dengan arah kebijakan pembangunan untuk mengetahui penelitian dan pengembangan yang mendukung dan tidak mendukung. Berikut merupakan ilustrasi persandingan yang dilakukan antara klaster bidang urusan dan penelitian yang mendukung.

Hasil dari analisis gap yaitu teridentifikasinya klaster-klaster yang memiliki gap tinggi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab Metode Penelitian, klaster sasaran yang termasuk dapat Gap Tinggi merupakan kelompok klaster sasaran yang memiliki sedikit kegiatan kelitbangan yang mendukung.



(Sumber: Analisis peneliti, 2021)

Gambar 6. Persandingan antara Kegiatan Kelitbangan yang Mendukung dengan Cascading Visi dan Misi I RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026



Sumber: Analisis peneliti, 2021

Gambar 7. Persandingan antara Kegiatan Kelitbangan yang Mendukung dengan Cascading Visi dan Misi III RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026



(Sumber: Analisis peneliti, 2021)

Gambar 8. Persandingan antara Kegiatan Kelitbangan yang Mendukung dengan Cascading Visi dan Misi V RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Tabel 1. Rekap Hasil Analisis Gap

Klaster	R	D	E
Klaster 1	10	20	2
Klaster 2	2	25	0
Klaster 3	1	10	0
Klaster 4	0	18	0
Klaster 5	2	14	0
Klaster 6	13	48	0
Klaster 7	0	10	2
Klaster 8	11	76	3
Klaster 9	0	8	2
Klaster 10	66	75	10
Klaster 11	28	73	9
Nilai Tengah	2	20	2

Keterangan:
 GAP TINGGI: Jumlah penelitian yang mendukung < 27
 GAP RENDAH: Jumlah penelitian yang mendukung < 27

Sumber: Analisis peneliti, 2021

Hasil analisis gap: **Kategori I** merupakan kumpulan klaster yang memiliki jumlah kegiatan penelitian lebih dari 2 dan kegiatan pengembangan lebih dari 20. Adapun

klaster sasaran yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu Klaster 1, 2, 6, 8, 10, 11. Artinya, klaster yang termasuk ke dalam kategori ini telah didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung.

Kategori 2 merupakan kumpulan klaster yang memiliki jumlah kegiatan penelitian lebih dari 2 dan kegiatan pengembangan kurang dari 20. Hanya terdapat satu klaster yang termasuk dalam kategori ini yaitu klaster 5. Artinya, klaster yang termasuk ke dalam kategori ini masih membutuhkan dukungan kegiatan pengembangan.

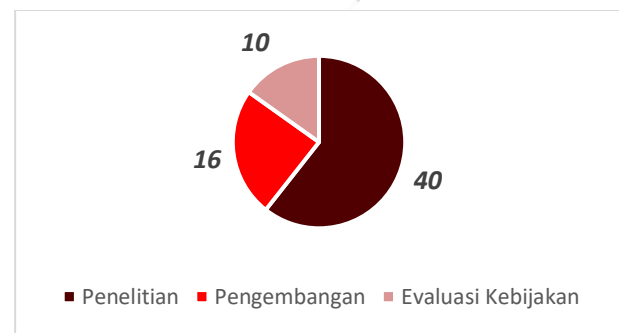
Kategori 3 merupakan kumpulan klaster yang memiliki jumlah kegiatan penelitian kurang dari 2 dan kegiatan pengembangan lebih dari 20. Berdasarkan hasil analisis pada kategori ini tidak terdapat klaster yang tergolong kategori 3.

Kategori 4 merupakan kumpulan klaster yang memiliki jumlah kegiatan penelitian kurang dari 2 dan kegiatan pengembangan kurang dari 20. Berdasarkan hasil analisis terdapat 4 klaster yang termasuk dalam kategori ini yaitu klaster 3, 4, 7 dan 9. Artinya, klaster yang termasuk dalam kategori ini masih membutuhkan dukungan usulan kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan arah kebijakan.

Berdasarkan penjabaran hasil analisis gap dan pengelompokan klaster ke dalam 4 kategori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, klaster sasaran yang masih memiliki gap tinggi pada analisis kebutuhan harus mendapat usulan kegiatan kelitbangan yang bentuknya berupa penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, klaster sasaran yang belum didukung oleh satupun kegiatan penelitian yang sesuai maka pada analisis prioritas akan mendapatkan label prioritas pertama. Hasil dari analisis gap ini juga pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kelitbangan pemerintah Kota Semarang selama ini. Secara umum, kegiatan kelitbangan masih didominasi oleh pelaksanaan kegiatan pengembangan seperti yang terjadi pada beberapa klaster sasaran khususnya pada misi 5. Ditunjukkan bahwa klaster pada misi 5 memiliki jumlah kegiatan pengembangan yang lebih banyak dibandingkan klaster sasaran pada misi 1 dan 3. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh jumlah bidang urusan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan lebih banyak.

Analisis Kebutuhan. Analisis kebutuhan kegiatan kelitbangan merupakan lanjutan dari tahapan analisis gap. Pada tahapan sebelumnya telah diketahui gap

antara arah kebijakan yang sudah dikelompokkan berdasarkan klaster dengan data penelitian perbidang urusan yang mendukung arah kebijakan. Hasilnya yaitu diketahui beberapa arahan kebijakan yang masih belum didukung oleh kegiatan kelitbangan. Setelah mengetahui adanya gap maka peneliti kemudian menyusun usulan kegiatan kelitbangan yang dibutuhkan dengan mencermati indikator capaian, sasaran, strategi, dan program prioritas yang sudah dirumuskan di dalam RA-RPJMD Kota Semarang 2021-2026. Maka dapat diketahui bahwa dibutuhkan 40 kegiatan penelitian, 16 kegiatan pengembangan, dan 10 kegiatan kelitbangan yang berbentuk evaluasi kebijakan untuk mengisi gap dan menyesuaikan kebutuhan pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 (Gambar 9).



(Sumber: Analisis Peneliti, 2021)

Gambar 9. Hasil Analisis Kebutuhan: Perbandingan Jumlah Kebutuhan Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi Kebijakan Analisis Prioritas

Berdasarkan hasil analisis gap dan kebutuhan penelitian, terdapat 45 usulan topik kegiatan kelitbangan bidang sosial, budaya, dan pemerintahan yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh OPD Kota Semarang di tahun 2021-2026. Usulan tersebut juga telah diidentifikasi jenis kegiatannya yaitu antara jenis kegiatan penelitian, pengembangan, maupun evaluasi kebijakan. Pada tahapan ini penentuan prioritas pelaksanaan usulan topik kelitbangan dilakukan setelah mengetahui gap antara arah kebijakan dengan daftar penelitian yang mendukung. Pada penelitian ini terdapat 3 bentuk prioritas dalam pemberian arahan pentahapan pelaksanaan usulan topik kelitbangan yaitu sebagai berikut:

Prioritas I: Klaster sasaran dikelompokkan pada prioritas ini jika belum terdapat kegiatan kelitbangan yang mendukung arah kebijakan dan yang paling mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang paling mendesak pada tahun 2022. Adapun jumlah usulan kegiatan kelitbangan yang mendapat prioritas I yaitu sebanyak 7 usulan topik.

Prioritas 2: Klaster sasaran dikelompokkan pada prioritas ini jika kegiatan pengembangan yang mendukung arah kebijakan selama ini lebih banyak dari penelitian, sehingga dibutuhkan usulan topik penelitian baru agar arahan kebijakan tersebut juga didukung oleh kegiatan penelitian. Adapun jumlah usulan kegiatan kelitbangan yang mendapat prioritas 2 yaitu sebanyak 31 usulan topik.

Prioritas 3: Klaster sasaran dikelompokkan pada prioritas ini jika kegiatan penelitian yang mendukung arah kebijakan selama ini lebih banyak atau lebih

mendominasi, sehingga dibutuhkan usulan topik pengembangan yang baru. Adapun jumlah usulan kegiatan kelitbangan yang mendapat prioritas 3 yaitu sebanyak 8 usulan topik.

Analisis Roadmap Penelitian dan Pengembangan. Berikut ini merupakan ringkasan isi dari *roadmap* kegiatan kelitbangan yang telah disusun berdasarkan tahun pelaksanaan, bidang urusan, dan bidang urusan yang bertanggungjawab. Usulan *roadmap* yang lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.

a. Longlist Usulan Tema Kelitbangan Tahun 2022

Tahun	Usulan	Bidang Urusan	Bidang Urusan yang Bertanggungjawab
2022	• Pengembangan sekolah swasta gratis dan sekolah non-formal untuk anak-anak yang kurang mampu	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Dinsos
	• Penerapan materi pengenalan budaya lokal pada pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	• Peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga pendidik di masa pandemi	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	• Rekomendasi Kebijakan Strategis Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	• Telemedisin untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	• Kajian indeks pembangunan pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dinpora, BAPPEDA
	• Peningkatan daya saing pemuda melalui kegiatan pelatihan keterampilan, dan kemahiran vokasional, serta kewirausahaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dinpora
	• Kajian terkait pembangunan berorientasi pada pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dinpora, BAPPEDA
	• Kajian terkait peningkatan daya saing tenaga kerja muda selama masa pandemi	Disnaker	Disnaker
	• Kajian dampak sosial dan ekonomi Pandemi Covid-19 pada rumah tangga di Kota Semarang	Sosial	Dinsos, BAPPEDA
	• Menjaga Ketahanan PPKS dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	Sosial	Dinsos, BAPPEDA
	• Strategi Kebijakan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Pemulihan Pasca-Pandemi COVID-19	Sosial	Litbang BAPPEDA
	• Transformasi Digital, Pelayanan Publik di Masa Pandemi	Komunikasi dan Informatika	Dsikominfo, Dispendukcapil

b. Longlist Usulan Tema Kelitbangan Tahun 2023

Tahun	Usulan	Bidang Urusan	Bidang Urusan yang Bertanggungjawab
2023	• Pendataan dan pemetaan sekolah yang sudah melaksanakan penerimaan peserta didik dengan teknologi informasi (PPD TI)	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Diskominfo
	• Peningkatan Manajemen Pengembangan SDM	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	• Pengembangan e-health, telemedicine, m-health untuk memperluas akses layanan kesehatan berbasis layanan bergerak dan digital	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Diskominfo
	• Penyusunan kebijakan E-Medis	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Diskominfo
	• Kajian aset budaya Kota Semarang	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	• Kajian Desa Budaya Berbasis Budaya Lokal	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	• Kajian dinamika penyerapan tenaga kerja selama pandemi	Tenaga Kerja	Disnaker
	• Model pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tenaga Kerja	Disnaker
	• Kajian Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3A, Dinsos, DPP KB
	• Kajian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	BKPP
	• Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	BPKAD, Sekretaris DPRD

c. Longlist Usulan Tema Kelitbangan Tahun 2024

Tahun	Usulan Tema	Kategori	Instansi
2024	Kajian terkait pengoptimalan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	BAPPEDA, Setda (Bagian Pemerintahan)
	Kajian dan evaluasi terkait pengoptimalan program Kampung Tematik sebagai alternatif untuk mewujudkan masyarakat tangguh	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	BAPPEDA, Setda (Bagian Pemerintahan)
	Kajian strategis indikator kemiskinan Kota Semarang	Sosial	Dinsos, BAPPEDA
	Kajian Implementasi SPM terkait Pelayanan Rehabilitasi di dalam Panti	Sosial	Dinsos, DP3A
	Kajian efektivitas kegiatan UUPKS di Kota Semarang	Sosial	Dinsos, BAPPEDA, Setda
	Penguatan Kebijakan Kesetaraan Gender Kota Semarang	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3A
	Penguatan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3A, Dinsos, DPP KB
	Evaluasi Penerapan Satu Data di Kota Semarang	Perencanaan	BAPPEDA, Diskominfo
	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pengawasan	Inpspektorat, Sekretaris DPRD
	Kajian Kritis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sebagai Alat Manajemen Kinerja	Pengawasan	Inpspektorat

d. Longlist Usulan Tema Kelitbangan Tahun 2025 dan 2026

Tahun	Usulan Tema	Kategori	Instansi
2025	Evaluasi kebijakan terkait pemerataan kualitas tenaga pendidik untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Penyusunan Kebijakan Redistribusi SDM Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Implementasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kesbang, Dinas Pendidikan
	Optimalisasi Peran Satlinmas di Kelurahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP, Kecamatan
	Bentuk partisipasi masyarakat perkotaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan hunian	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP, Kecamatan
2026	Pengembangan Budaya Masyarakat yang Sadar Hukum	Penelitian dan Pengembangan	Litbang BAPPEDA
	Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan E-Governance	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dispenduk Capil
	Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan E-Governance	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo

Arahan bentuk pelaksanaan kelitbangan bidang sosial, budaya, dan pemerintahan tahun 2021-2026 terdiri menjadi dua bentuk yaitu dengan cara swakelola dan hibah terbuka atau kompetitif (Tabel 2).

Swakelola merupakan pelaksanaan oleh internal OPD sebagai penanggung jawab dengan sumber anggaran berasal dari APBD Kota Semarang. Swakelola juga dapat dilakukan dengan kerja sama pihak lain seperti OPD lainnya, perguruan tinggi berbadan hukum, maupun non-pemerintahan lainnya.

Hibah terbuka atau kompetitif yaitu pelaksanaan kelitbangan dengan cara dihibahkan

kepada pihak non pemerintahan maupun perguruan tinggi yang berbadan hukum dengan sumber anggaran bisa dari APBD atau dari pihak pemenang hibah tersebut.

Sumber anggaran pelaksanaan kelitbangan secara hibah bisa melalui APBD atau dana dari pihak yang memenangkan hibah tersebut. Penentuan pelaksanaan setiap usulan tema kegiatan kelitbangan tahun 2021- 2026, baik menentukan pihak penanggungjawab maupun bentuk pelaksanaan kegiatan kelitbangan tersebut dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Melihat tupoksi masing-masing OPD/ instansi dan lembaga terkait dengan bidang sosial, budaya, dan pemerintahan.

2. Melihat kesesuaian tema/ topik usulan tema kelitbangan Kota Semarang tahun 2021-2026 dengan tugas, peran, dan fungsi masing-masing OPD/ instansi dan lembaga yang bersangkutan sebagai pelaksana kegiatan kelitbangan tersebut. Kegiatan kelitbangan yang bersifat *scientetif/ilmiah* dapat dilakukan secara kerja sama maupun dihibahkan kepada perguruan tinggi.
3. Melihat jenis kegiatan setiap usulan tema kelitbangan Kota Semarang tahun 2021-2026. Apabila kegiatan berupa penelitian dan evaluasi dapat dilakukan dengan swakelola, kerja sama OPD lain atau non-OPD (akademisi, NGO, dan lembaga lain), atau hibah terbuka.

Sementara jenis kegiatan pengembangan dapat dilaksanakan dengan swakelola maupun kerja sama OPD terkait lainnya atau dengan pihak NGO/ lembaga lainnya. Pentahapan pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada idealnya disesuaikan dengan prioritas program RA-RPJMD. Namun pentahapan ini juga memperhatikan tingkat permasalahan yang sebelumnya telah dianalisis dan telah teridentifikasi prioritas dari setiap usulan tema kelitbangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila terjadi perubahan pentahapan pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang juga akan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Kota Semarang.

KESIMPULAN

Penyusunan kajian strategis kelitbangan ini dilakukan agar Pemerintah Kota Semarang memiliki panduan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pencapaian arah kebijakan perencanaan dan pembangunan Kota Semarang untuk lima tahun mendatang. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menggiring pencapaian visi dan misi rencana pembangunan Kota Semarang yang telah disepakati dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026.

Berdasarkan penyusunan kegiatan kelitbangan bidang sosial, budaya, dan pemerintahan terdapat 45 usulan topik kelitbangan dengan jenis kegiatan berupa penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan. Usulan tersebut tentunya didistribusikan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2021-2026. Prioritasi dan pentahapan dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas program yang telah ditetapkan pada RA-RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026. Selain itu juga memperhatikan kemampuan penganggaran yang dapat dikeluarkan oleh Litbang Bappeda selama 5 tahun.

Oleh karena itu, pelaksanaan usulan tema kelitbangan juga tidak hanya melibatkan Litbang Bappeda sebagai pelaksana/ penanggung jawab, melainkan juga melibatkan OPD/ instansi yang berkaitan dengan fungsi dan perannya, serta pihak akademisi, NGO, maupun lembaga lainnya yang dapat didistribusikan pada kegiatan yang bersifat swakelola, kerja sama atau hibah terbuka. Adanya kegiatan penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan di bidang sosial, budaya, dan pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi dasar atau input bagi perumusan kebijakan, rencana, serta penyelesaian masalah pembangunan di masa mendatang supaya lebih efektif dan efisien serta lebih integratif dan komprehensif.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk menghadapi kajian strategis kelitbangan selanjutnya, berangkat dari kendala yang dihadapi penyusun hingga pada titik penyelesaian kajian ini. Beberapa rekomendasi tersebut yaitu:

1. Perlunya koordinasi antara Litbang Bappeda Kota Semarang dengan OPD lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kelitbangan. Hal ini berkaitan dengan penyediaan dan sinkronisasi data hasil kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD di setiap tahunnya. Selain itu juga bertujuan supaya kegiatan penelitian dan pengembangan ini tidak hanya sebagai dokumentasi atau inventarisasi masing-masing OPD, melainkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
2. Dokumen penelitian dan pengembangan juga dapat dipublikasikan rutin pada situs web milik Pemerintah Kota Semarang. Selain untuk kepentingan bagi OPD dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan, namun juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, akademisi, dan lembaga lainnya untuk menambah informasi terbaru atau pengetahuan baru, maupun penentuan penelitian-penelitian baru di kemudian hari dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan kondisi terkini di Kota Semarang, sehingga akan lebih *up to date* dengan kondisi pembangunan secara global. Selain itu juga dapat dimanfaatkan lainnya yang mendukung pembangunan di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulmer, M. (1982) *The uses of social research: social investigation in public policymaking* London: Allen and Unwin, 184pp.
- Finch, J. (1986) *Research and policy: the use of qualitative methods in social and educational research* London: Falmer Press, 275pp (Social Research and Educational Studies 2).
- Davies, Philip (2005). *Evidence-based Policy at the Cabinet Office: A transcript of a talk at ODI, Impact and Insight meeting*, 17 Oktober 2005.
- Dukeshire, S., Thurlow, J (2002). *Understanding the Link Between Research and Policy*. Rural Communities Impacting Policy Project. ISBN 0-9780913-0.
- Basitha, I (2018). *The Role of Research Institutions and Private Sector in Encouraging Evidence Based Public Policy*. Summary of Research and Business Forum #4. Knowledge Sector Initiative.
- Laporan Akhir Kajian Penyusunan Indikator Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Kota Semarang (2020).
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2017.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2018.